BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana *civil society* yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani semakin mendapat tempat di dalam wacana politik Indonesia. *Civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat barat, *civil society* yaitu organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) adalah pengewejantehan kelembagaan *civil society* tentu saja tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mengambil jarak tentang kepentingan ekonomi, kondisi *civil society* mengalami pasang surut kemajuan, kemunduran, kekuatan, kelemahan dalam perjalanan sejarahnya. *Civil society* di Indonsia pada saat ini masih jauh untuk menjadi kekuatan penyeimbang dari kekuatan negara.¹

Civil society merupakan konsep yang dilahirkan di barat, civil society memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik itu secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Pentingnya civil society bagi negara barat sangat terlihat jelas pula di dalam berbagai kegiatan pembangunan di mana civil society mengambil peranan penting di dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan seiring dengan perkembangan zaman konsep civil society terus di pergunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berdasarkan pandangan historis seperti halnya civil society di negara barat maka Indonesia organisasi civil society pun lahir beriringan dengan tumbuhnya demokrasi.

¹ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan civil Society* (Jakarta:Pustaka, 1999),4.

Esensi yang umum dan sangat mendasar dari demokrasi adalah adanya prinsip kebebasan dan juga kesamaan yang ditujukan dalam proses politik guna proses pengambilan keputusan kebijakan yang baik bagi jalanya pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu esensi dasar dari organisasi *civil society* adalah kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan yang tentunya dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksana demokrasi itu sendiri. Untuk mengawal suatu proses politik maka diperlukan organisasi *civil society* yang mandiri kuat. Di Indonesia tidak jarang organisasi *civil society* seperti LSM atau bahkan organisasi keagamaan turut serta dalam proses politik.²

Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap memiliki tiga fungsi yaitu: Sebagai komplementer di mana elemen elemen *civil society* mempunyai aktifitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (*public service*), *civil society* menjadi monitor penggerak bagi berfungsinya sistem sosial, *civil society* merupakan ORNOP / organisasi masyarakat non pemerintah.

Jombang adalah Kota Santri yang banyak mempunyai lahan pertanian. Selain itu itu Jombang juga mempunyai akses bagus dalam pembangunan insfraktrutur tol seperti pembangunan tol Jombang-Mojokerto. Pembangunan insfraktruktur jalan di Indonesia khususnya jalan tol sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi kemacetan pada ruas utama, insfraktruktur jalan tol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan masyarakat dalam hal berinteraksi. Insfraktruktur jalan tol juga merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi pasar dan para konsumen akan tetapi dengan adanya pembangunan jalan tol maka akan mengaanggu stabilitas lingkungan serta

² Ibid., 5.

mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang lahanya dibebaskan untuk pembangunan jalan tol. Proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan untuk tol selalu berakibat pada konflik di masyarakat.

Infrastruktur dan prioritas pembangunan di setiap daerah terutama Kabupaten atau Kota merupakan kerangka pembangunan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dimana Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi. Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten, pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota dan kerja sama penataan ruang antar Kabupaten/ Kota. Wewenang pemerintah daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur ini dibagi menjadi beberapa ruas, salah satunya adalah Ruas Mojokerto - Jombang yang merupakan ruas terpanjang di Jawa Timur, ruas tol sepanjang 40,5 kilometer ini di bangun oleh P.T. Marga Harjaya Insfraktruktur (MHI) dengan nilai investasi 3 triliun. Pada tahun 2007 tol Jombang di canangkan, penentuan lokasi pembangunan jalan tol Joker (Jombang - Mojokerto) di tandai dengan terbitnya keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/21/KPT/013/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan bebas hambatan (Tol mojokerto jombang) jalan tol Mojokerto- Jombang terbagi empat seksi dengan panjang 40,5 kilometer seksi 1 terbentang mulai Kecamatan Bandarkedung

³ Gerakan Masyarakat Peduli Agraria, Press Release.1 April 2017

mulyo hingga Kecamatan Tembelang Jombang. Seksi 2 sepanjang 19,9 kilometer terbentang mulai Kecamatan Tembelang hingga Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto. Sedang seksi 3 mulai Desa Kemantren Kecamatan Gedek, hingga Desa Canggu Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ruas sepanjang 5 kilometer. Ruas tersebut yang menghubungkan tol Jombang - Mojokerto dengan tol Sumo (Surabaya Mojokerto). Dengan tol Soker (Solo - Kertosono). Untuk seksi 4 berada di ruas Desa Brodot Desa Gondangmanis, Kecamatan Bandarkedung mulyo Jombang ruas terakhir ini akan menghubungkan tol Jombang Mojokerto. ⁴

Tol Jombang Mojokerto mengalami perjalanan panjang hingga saat ini belum selesai bukan karena pemegang hak konsensi tidak serius dalam melakukan pengerjaan tetapi karena pembebasan lahan sangat sulit penolakan warga mengalir tiada henti untuk merealisasikan lokasi jalan tol tersebut Bupati Jombang telah menerbitkan surat keputusan Nomor188,445/415.12/2009 tentang panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Jombang.

Lahan yang digunakan untuk tol mencapai 1.299.732 meter persegi milik 1.503 warga panjang jalan tol tersebut mencapai 40,5 kilometer. Pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut telah disosialisasikan kepada warga. untuk wilayah Jombang sosialisasi telah dilakukan pada 23 mei 2007 di Kecamatan Bandarkedungmulyo, kemudian 24 Mei di Kecamatan Megaluh, 25 Mei di Kecamatan Jombang, serta 29 Mei 2007 di kecamatan Tembelang. Setelah dilakukan investarisasi lahan terdampak, kemudian dilakukan musyawarah penetapan harga masing -masing di kantor desa yang dilalui jalan tol dan dihadiri para pemilik lahan. Tetapi proses itu tidak berjalan dengan mulus karena mengalami penolakan, Akibatnya proses pembebasan lahan terhambat bahkan baru tuntas pada September 2016.

⁴ M. beritajatim.com ekonomi di unduh 26 april 2017

Seperti halnya pembangunan dan kebijakan di Jombang mengabaikan kedaulatan pangan dan keadilan agraria, permasalahan pembangunan tol Jombang-Mojokerto di area lahan hijau. Bukti riil bahwa pembangunan infrasturktur di Kabupaten Jombang telah gagal atau lebih merugikan masyarakat terlebih lahan pertanian produktif dan petani yakni terjadi hujan lebat yang mengakibatkan beberapa wilayah Kota Jombang dan Pedesaan yang terkena dampak dari adanya pembangunan tol Jombang-Mojokerto, serta pembangunan perumahan di lahan pertanian produktif mengalami kebanjiran. Hal ini merupakan masalah serius yang harus disikapi secara komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Jombang guna mencegah serta mengupayakan irigasi air yang lancar untuk mengurangi dampak banjir akibat hujan dan melakukan kajian pembangunan infrastruktur kembali berdasarkan rencana tata ruang wilayah Nasional dan Provinsi.

Peristiwa hujan lebat membawa dampak di berbagai wilayah Kabupaten Jombang terutama di Pedesaan, berikut adalah beberapa contoh nyata wilayah pedesaan yang merasakan kerugian akibat dampak kebrutalan pembangunan infrastruktur yang tidak teratur dan tidak terawasi yang menimbulkan pemiskinan baru. Desa Kendalsari juga merupakan Lahan Pertanian Produktif yang terkena dampak Pembangunan tol Jombang-Mojokerto dimana lahan pertanian mereka pun ikut terendam air ketika hujan lebat serta saluran irigasi pengairan sawah yang tidak teratur secara sistematis yang menyebabkan saluran irigasi air persawahan tidak mengalir secara baik. Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben yang sekarang bertempat tinggal di Sambong, yang memiliki tanah seluas (526 meter) yang sampai hari ini belum mendapat ganti rugi tapi tanahnya sudah di garap.⁵

Tidak hanya menimbulkan kerugian pada lahan pertanian warga sekitar terjadi konflik antara pihak pemerintah dan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya

⁵ Gerakan Masyarakat Peduli Agraria, Press Release.1 April 2017

Jombang juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pengadilan negeri setempat mereka menuntut ganti rugi yang di tawarkan masih belum layak, mereka melakukan pemblokiran jalan dengan menyebar kotoran manusia selain itu mereka juga mengancam bunuh diri dengan meledakkan tabung gas elpiji aksi demo itu terjadi & kembali lagi terjadi aksi unjuk rasa demo yang terdiri dari 2 Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Kesamben yang mengatasnamakan (JKPT) Jamaah Korban Pembangunan Jalan Tol, aksi tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, sebelum itu juga terjadi aksi korban tol Jombang - Mojokerto Tanggal 16 desember 2014.

Jamaah Korban Pembangunal Tol Jombang-Mojokerto yang melakukan aksi jalan kaki menuju istana negara, aksi ini dilakukan untuk menuntut ganti rugi dan memperjuangkan hak atas 350 an lahan warga yang di gunakan untuk tol mereka berharap sesampai di Jakarta dapat berauedensi dengan presiden untuk menyelesaikan proses eksekusi lahan warga yang tidak manusiawi dan merugikan.⁷

Tanggal 21 September 2016 sejumlah warga Desa Kayen, Kecamatan Bandar kedungmulyo, Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok jamaah korban pembangunan jalan tol melakukan aksi penolakan proyek jalan tol kertosono mojokerto mereka mengubur diri dalam tanah, mereka mebopong tubuh perempuan sudarmi warga setempat, perempuan itu di masukkan ke dalam liang kubur ukuran sekitar 1,5 meter x 50 sentimeter. Perempuan yang mengaku sebagai pemilik lahan bakal di bebaskan untuk proyek tol itu di tanam mulai leher kaki sedangkan massa menaburkan bunga sembari melafalkan lailahaillahhah dan supriyano sama dengan sudarmi ditimbun dengan tanah ini sebagai penolakan terhadap rencana eksekusi lahan tol Jombang -

-

⁶ M.bangsaonline.com di unduh 24 April 2017

⁷Kbr.id korban _tol_mojokerto_kertosono di unduh 24 April 2017

Mojokerto dan ada sekitar 21 warga Desa Kayen menolak ganti rugi atas tanah yang dilewati proyek tol mereka menilai ganti rugi tidak layak.8

Tanggal 30 Agustus 2016 puluhan warga yang tergabung dalam jamaah korban pembangunan tol yang berasal dari empat desa di dua Kecamatan (Kesamben dan Sumobito) yakni Desa Watukadon Desa Kedung melati blimbing Kecamatan Kesamben dan Desa KendalSari Kecamatan Sumobito mereka unjuk rasa ke pengadilan negeri PN Jombang mereka berharap agar PNB meminta pemerintah menunda eksekusi yang rencana dilakukan selain itu membentangkan poster dan spanduk protes, mareka juga membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan bagi warga pemilik tol. Puluhan warga yang tergabung dalam JKPT ini melakukan unjuk rasa dan berorasi, warga tidak pernah diajak bermusyawarah dalam menentukan ganti rugi, warga hanya diberi sosialisasi besaran harga. Karena itu mereka meminta PN untuk menunda eksekusi harga yang telah ditentukan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan permintaan warga pemilik lahan. Dan sudah berubah beberapa kali dulu pakai patokan harga dengan SK gubernur Jatim, kemudian sekarang memakai SK PPK dengan harga yang telah di tentukan, jadi proses penetuan ganti rugi tol tidak sesuai aturan, karena warga tidak pernah di ajak musyawarah padahal dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2012 pasal 68-73 di jelaskan bahwa panitia harus menyelenggarakan musyawarah secara terbuka adil dan transparan.⁹

Tanggal 31 Agustus 2016 Sejumlah warga Desa Watukadon Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang memblokade akses menuju jalan tol Mojokerto dengan menebar kotoran manusia di atas jalan itu dilakukan untuk menghadang pelakasanaan eksekusi lahan tol Jombang - Mojokerto mereka juga

https://m.detik.com di unduh pada 25 April 2017
 Surabaya.Tribunewes.com di unduh pada 25 April 2017

mengancam bunuh diri dengan meledakkan tabungan gas elpiji. Warga menolak eksekusi lahan tol tersebut karena ganti rugi terlalu murah, karena dirasa masih di rugikan oleh adanya pembangunan insfraktruktur tol Jombang-Mojokerto. Aksi demo itu berlanjut terjadi pada bulan April tahun 2017 Peristiwa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar dampak ekonomi dan sosial, adanya massa yang menuntut agar segera diselesaikan. 10 Massa tersebut yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Agraria adalah salah satu bentukan dari kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang atas dasar kesepakatan bersama dari beberapa organisasi kepemudaan yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMPI, LAKPESDAM, KMJ, Women Crisis Center (WCC) BEM UNDAR, Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang, dengan melihat banyaknya dampak kerugian sosial, ekonomi, psikologis di masyarakat pada pembangunan insfraktruktur tol, kemudian kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang mengundang berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Jombang untuk mengkaji beberapa dampak yang terjadi pada pembangunan insfraktruktur tol Jombang - Mojokerto untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk kepentingan masyarakat kemudian munculah gerakan masyarakat pedulia agraria mereka menggelar aksi demonstrasi di gedung dewan, mereka menuntut pencabutan peraturan daerah pembangunan infraktruktur mengakibatkan dampak dan konflik terhadap masyarkat . aksi yang di lakukan gempar ini menolak dengan adanya eksploitasi lahan pertanian di Kota Santri, aksi yang di mulai dari Universitas Darul Ulum Jombang (UNDAR).

Gerakan masyarakat peduli agraria ini menuntut pemerintah mencabut peraturan daerah no 21 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang karena

.

¹⁰ Regional.kompas.com di unduh pada 26 April 2017

dinilai tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan. Seharusnya pihak pemerintah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Jombang dengan pembangunan insfraktuktur tol Jombang -Mojokerto.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel kronologi penggusuran lahan pembangunan jalan to Jombang- Mojokerto.

Tabel 1.1

Kronologi Penggusuran Lahan Jombang- Mojokerto

NO	Tahun	Peristiwa Peristiwa
1	2007	Tol jombang di canangkan
2	24 januari 2007	Persetujuan penetapan lokasi pembangunan jalan to
3	23 Mei 2007	Sosialisasi kepada masyarakat yang lahanya di gusur dan penetapan harga
4	2014	Penolakan warga terhadap pembangunan jalan tol
5	2014-2016	Demo warga terhadap penggusuran lahan
6	3-Apr-17	Advokasi GEMPAR

Civil society yang di sebut masyarakat madani sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individuindividu dan kelompok – kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara, adanya ruang publik bebas (the free publich sphere) sebagai wahana dari keterlibatan politik secara aktif warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar

10

ia tidak intervensionis. ¹¹ Seperti halnya kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang dan GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Agraria) *civil society* mengambil peranan penting di dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang akan di terapkan, dengan melihat fenomena konflik penggusuran lahan dalam pembangunan infraktrutur tol yang menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang dan GEMPAR ini memperjuangkan hak, kepentingan masyarakat dalam pembangunan insfraktrutur tol tersebut. untuk itu menarik untuk di teliti dengan judul gerakan *civil society* dalam penggusuran lahan (studi tentang kontras Surabaya biro

bantuan hukum Jombang dan aliansi aksi gerakan masyarakat peduli agraria) pada

pembangunan insfraktruktur tol Jombang Mojokerto. Merujuk pada masalah di atas

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan strategi Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang dan aliansi gerakan masyarakat peduli agraria (GEMPAR) sebagai salah satu elemen *civil society organization* dalam penggusuran lahan pada pembangunan insfraktrutur

pembangunan tol Jombang-Mojokerto?

penulis merumuskan sebagai berikut.

C. TUJUAN PENELITIAN

 Mendeskripsikan bentuk dan strategi Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang gerakan aliansi masyarakat peduli agraria (GEMPAR) sebagai salah satu elemen CSO (civil society organization) dalam penggusuran lahan pada pembangunan insfraktrutur

pembangunan tol Jombang-Mojokerto?

.

¹¹ Sufyanto, Masyarakat Tammadun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001), 113-115

D. MANFAAT PENELITIAN

- 1. Secara teoritis-akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan membuka wacana lebih lanjut tentang kajian tentang civil society dan memperkaya literatur serta bahan kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan ilmuan, serta Menggambarkan fenomena sosial-politik yang ada.
- Secara praktis-empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada civil society organization CSO (civil society organization) yang lain. Sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi.

E. BATASAN PENELITIAN

Batasan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat di mengerti dengan mudah dan baik. Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang dibahas, hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginprestasikan hasil penelitian, ruang lingkup penelitian di maksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.¹²

F. TINJAUAN PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, agar tidak terjadi pengulangan. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang sudah ada:

Skripsi Muhammad Ardha Mulyono, mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas airlangga tahun 2014 yang berjudul Gerakan Solidaritas LSM Kalimas Surabaya Studi Tentang: Sangketa Lahan Antara Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI DAN

 $^{^{12}}$ www.informasiahli.com penelitian di unduh pada 7 mei 2017

PT.PELINDO III .Skripsi ini mengkaji mengenai konflik antara warga kalimas baru dengan pihak PT.KAI dan PT PELINDO III, Penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif.

Skripsi Hasyim Nur Rahman, mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas airlangga tahun 2012 yang berjudul: Dinamika Gerakan Sosial Di Kota Surabaya: Studi kasus tim anti penggusuran masyarakat pinggir rel Surabaya dalam penolakan pembanguan jalan tol tengah Kota. Skripsi ini Mengkaji bagaimana upaya yang di lakukan masyarakat pinggir rel kereta terkait penolakan jalan tol, Penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif.

Skripsi Faris Umar Hasbullah, mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas airlangga tahun 2016 yang berjudul: Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang Skripsi ini Mengkaji bagaimana upaya Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi hutan yang di lakukan, Penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif.

G. METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul gerakan civil society dalam penolakan penggusuran lahan tol Jombang -Mojokerto (Studi tentang kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang dan gerakan masyarakat peduli agraria) adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif di mana pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya. ¹³

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek dan selama penulisan data

¹³ Kriyanton, Rachmat, Teknik *Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2006) hal 56

yang penulis paparkan berasal langsung dari lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Metode ini menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif, penelitian ini juga harus fokus kepada fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat holistic (utuh) dan sistematis terkit dengan suatu keseluruhan, tidak bertumpu pada pengukuran sebab penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh melalui pelaku yang dalam hal ini adalah sasaran penelitian. 14

Metode penelitian kualitatif merupakan proses atau prosedur penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, ungkapan dan perilaku manusia yang diamati. 15 Lebih lanjut didefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungannya yang berhubungan dengan orang-orang dengan bahasa dan istilah mereka sendiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif penilitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan evaluasi, menetukan apa yang di lakukan orang lain dalam menghadapi masalah. Penelitian deskriptif menggambarkan realitas yang terjadi tanpa menjelaskan hubungan variabel dan tidak menguji hipotesis. 16

¹⁶ Ibid.24

Nur Syam. Metode Penelitian dakwah . (Solo: Ramadhan 1991) 11.
 M.Irfan Islami. Policy Analisis : Seri Monografi Kebijakan Public. (Malang: UNBRAW 2000) 19.

b. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk mencari realitas kebenaran maka dibutuhkan metode di bawah ini dalam penelitian yang dilakukan:

1. Wawancara Mendalam (dept interview)

Wawancara mendalam adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi yang lengkap dan detail dari informan artinya informan bebas memberikan jawaban.¹⁷

2. Metode Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena so<mark>sia</mark>l dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian pada Gerakan civil society dalam penolakan penggusuran lahan (studi tentang kontras surabaya biro bantua hukum Jombang dan aliansi gerakan masyarakat peduli agraria)

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar. ¹⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Data-data dan dokumentasi tersebut penulis pilih yang berkaitan langsung.

Teknik Penentuan Informan Penelitian

¹⁷ Ibid,93 ¹⁸ Ibid, 135.

Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu tekhnik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin memudahkan peneliti menjelajahi objek yang di teliti, informan yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Ketua GEMPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Agraria)
- 2. Koordinator Aksi
- 3. Koordinator Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang
- 4. Korban Jamaah Korban Pembangunan Tol (JKPT)
- 5. Beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdiri dari:
 - a) GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
 - b) HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia
 - c) Lakpesdam NU
 - d) WCC (Women Crisis Ceneter)
 - e) Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang
 - f) GMPI (Gerakan Mahasiswa Persatuan Indonesia)
 - g) KMJ (Korsorsium Mahasiswa Jombang)
 - h) BEM UNDAR Jombang (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darul Ulum)

¹⁹Rulam, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 92

d. Teknik Analisis Data

Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.²⁰

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi lapangan.
- b) Penyajian data, yaitu deskripsi pengumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari awal pengumpulan data periset kualitatif mencari makna dari setiap data yang diperolehnya dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada alur kausalitas, dan proporsisi. Periset yang kompeten akan menangani kesimpulankesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi agar benar-benar valid dan kokoh.

e. Metode keabsahan data

Metode keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan tekhnik metodelogis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi di perlukan karena

²⁰ Ibid, 135.

setiap tekhnik memiliki kelemahan serta keunggulanya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Menurut Platon dalam bungin dalam metode kualitatif triangulasi sumber data di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi.
- b) Membandingkan tentang apa yang di katakan orang orang tentang situasi penilitian dengan apa yang di katakana sepanjang waktu.
- c) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa.
- d) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka seluruh kajian ini terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB I : Sebagai bab pendahuluan, bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, batasan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Tinjauan teori yaitu tentang konsep *civil society* dan teori gerakan sosial BAB III: Gambaran umum gerakan *civil society* dalam penolakan penggusuran lahann tol Jombang -Mojokerto (studi tentang kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang dan aliansi gerakan masyarakat peduli agraria).
- BAB IV : Memuat tentang analisa data-data yang telah didapat dan penyajian data tentang lokasi yang dipilih oleh peneliti yang kemudian dikaitkan dengan teori.
- BAB V: Memuat kesimpulan sebagai poin terakhir, penyampaian saran, dan penutup.